



RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025-2026



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO

KATA PENGANTAR

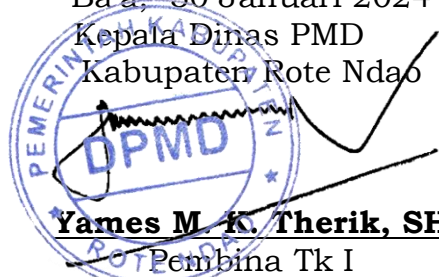
Pada tempat yang paling utama, patut kita panjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena tuntunan dan penyertaan-Nya maka rancangan (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Rote Tahun 2025-2026 ini dapat di susun sebagai dokumen yang perencanaan yang kamenengah dilingkungan Dinas Pemberdayaan Rote Ndao. Penyusunan rancangan renstra yang diakomodirkan dalam suatu harapan yang ingin dicapai dalam waktu mendatang. Serta kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pelaksanaan tugas pemberdayaan Masyarakat perdesaan dan pemerintahan desa kedepan akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat. Untuk itu, sesuai posisi dan peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, aktualisasi kebijakan strategis yang telah direncanakan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, perlu menjadi komitmen Bersama dan terus di kembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam Upaya mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kiranya rancangan renstra ini dapat dijadikan acuan strategis dan panduan operasional sekaligus sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao di waktu mendatang.

Ba'a, 30 Januari 2024

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Rote Ndao



James M. K. Therik, SH
Pembina Tk I

NIP. 19800429 1999903 1 001

KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum Penyusunan	3
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisa	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	9
1. Tugas Pokok dan Fungsi	9
2. Struktur Organisasi	11
3. Sumber Daya.....	17
4. Kinerja Pelayanan	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	28
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	30
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.....	33
BAB VII. INDIKATOR KINERJA	34
BAB VIII. PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi

daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (DPMD) Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Selanjutnya, RENSTRA DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
20. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;

21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh DPMD selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3.2 Tujuan

Renstra DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Rote Ndao.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi DPMD Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup

- 1.1. Latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD.

- 1.2. Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)

3.2 Isu Strategis

Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2026

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

4.2. Cascading kinerja perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2026.

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2026

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan :

2.1.1 Tugas Pokok

DPMD Kabupaten Rote Ndao merupakan Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan dan pemerintah desa

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi yang diemban DPMD Kabupaten Rote Ndao adalah

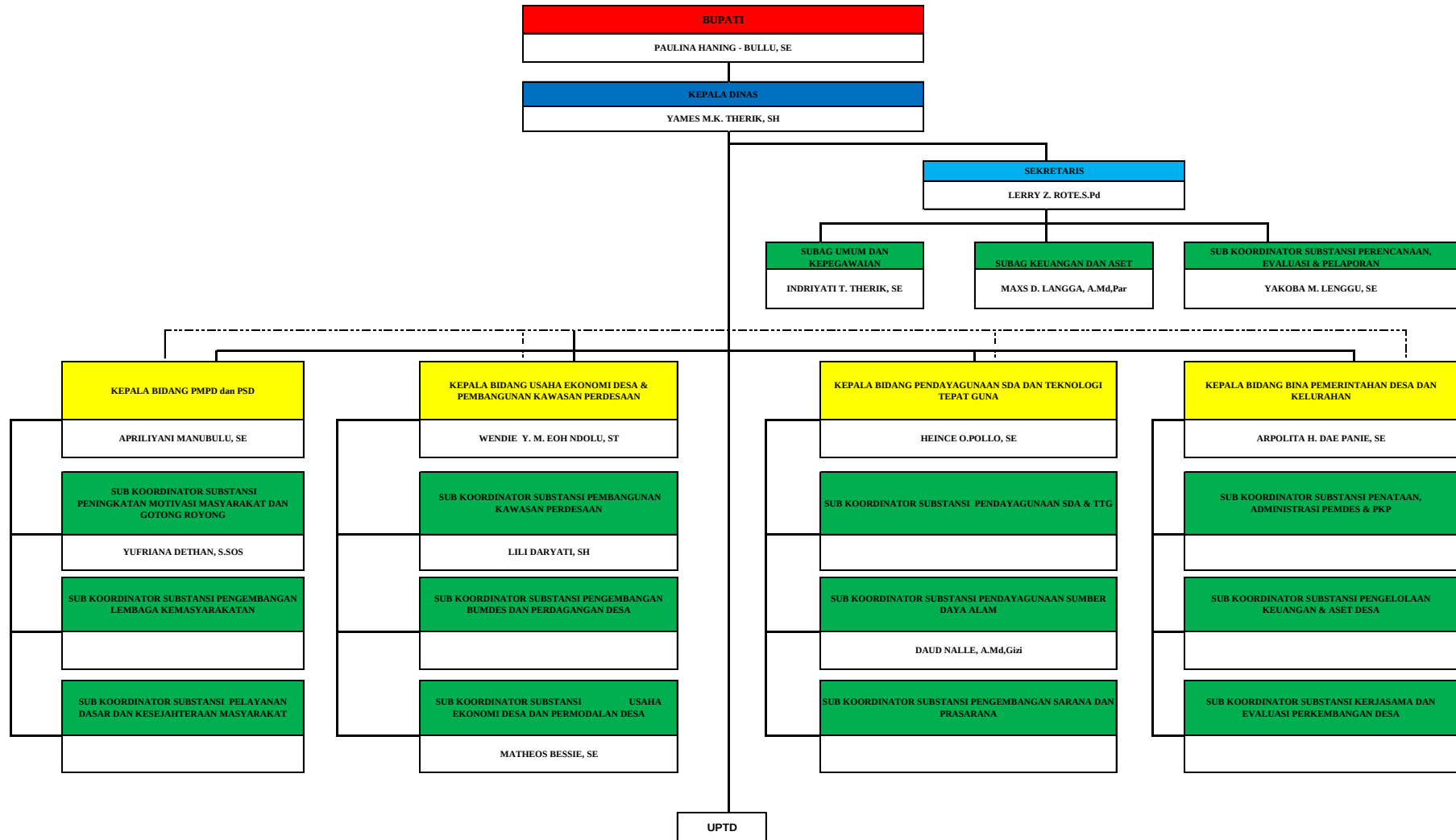
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa
- c. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Rote Ndao :

A. Struktur Organisasi DPMD

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao



Keterangan :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinator

1. Kepala

Struktur Dinas Pemberdayaan dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu Sekretaris dan 4 Bidang yakni Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosiasl Dasar, Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bidang Pendayagunaan SDA dan TTG, Bidang Bina Pemerintah desa dan Kelurahan.

2. Sekretaris

Sekretaris, Membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Perencana Ahli Muda

3. Bidang PMD dan PSD

Bidang PMD dan PSD, membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu :

- a. Sub Koordinator Substansi Peningkatan Motivasi Masyarakat dan Gotong Royong
- b. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Lembaga Masyarakat
- c. Sub Koordinator Sunstansi Pelayanan Dasar Kesejahteraan Masyarakat

4. Bidang UED dan PKP

Bidang Ued dan PKP, Membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu :

- a. Sub Koordinator Substansi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- b. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Pedagangan Desa
- c. Sub Koordinator Substansi Usaha Ekonomi Desa dan Permodalan Desa

5. Bidang Pendayagunaan SDA dan TTG

Bidang SDA dan TTG, Membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu :

- a. Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- b. Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Sumber Daya Alam

- c. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa

6. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- a. Sub Koordinator Substansi Penataan, Administrasi Pemerintah Desa dan Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa
- b. Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa
- c. Sub Koordinator Substansi Kerja sama dan Evaluasi Perkembangan Desa

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai tugas dan Fungsi sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b. pengoordinasian kebijakan di Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan , Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan di Sekretariat, Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan
- d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. perencanaan kebijakan operasional di Sekretariat;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Peningkatan Motivasi Masyarakat dan Gotong Royong, Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Seksi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Usaha Ekonomi Desa dan Permodalan Desa, Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik

Desa dan Perdagangan Desa, Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan rencana program Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan operasional Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan, Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa, Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, Seksi Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan operasional Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini DPMD telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai DMPD sampai saat ini berjumlah 30 PNS, Kualifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk I	1	-	1
2	IV/a	Pembina	2	1	3
<i>Jumlah Golongan IV</i>			<i>3</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
3	III/d	Penata Tk.I	-	5	5
4	III/c	Penata	3	1	4
5	III/b	Penata Muda Tk.I	4	-	4
6	III/a	Penata Muda	6	1	7
<i>Jumlah Golongan III</i>			<i>13</i>	<i>7</i>	<i>20</i>
7	II/c	Pengatur Tk.I	2	-	2
<i>Jumlah Golongan II</i>			<i>2</i>	<i>-</i>	<i>2</i>
TOTAL			18	8	26

Sumber Data DPMD 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, golongan III sebanyak 20 (dua puluh) orang dan golongan II sebanyak 2(Dua) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S1	10	8	18
2	D3	3	-	3
3	SLTA/SMK	5	-	5
Total		18	8	26

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao sebanyak 26 (Dua puluh enam) orang terdiri dari pendidikan S1 berjumlah 18 (delapan belas) orang, D3 berjumlah 3 (tiga) orang dan SMA berjumlah 5 (lima) orang. Susunan kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Susunan Pegawai Negeri

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Ket
1.	Yames M. K. Therik, SH NIP. 198004291999031001	Pembina Tk.I / IV b	Kepala Dinas PMD	S1
2.	Leri A. Rotte, SH NIP. 197104192006041002	Pembina/ IV a	Sekretaris	S1
3.	Heince O.Pollo, SE NIP. 197310242006041009	Pembina/ IV a	Kabid Bidang Pendayagunaan SDAdan TTG	SI
4.	Arpolita H. Dae Panie, SE NIP. 198306082010012023	Penata Tk. I / III d	Kabid Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan	S1
5.	Apriliyani Manubulu, SE	Penata Tk. I / III d	Kepala Bidang PMD & Pelayanan Sosial Dasar	S1
6.	Wendi Y.M.Eoh Ndolu, ST NIP.197603192011012002	Penata Tk. I / III d	Kabid UED & Pembangunan kawasan Perdesaan	S1

7.	Indriyati T. Therik, SE NIP.197208111992032010	Penata Tk. I / III d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
8.	Yakoba Marlein Lenggu, SE NIP. 198303272010012029	Penata Tk. I / III d	Perencana Ahli Muda	SI
9.	Maxs D. Langga, A.Md.Par NIP. 197609182006041005	Penata / III c	Kasubag Keuangan dan Aset	D3
10.	Lili Daryati, SH NIP. 198507092007012002	Penata / III d	Sub Koordinator Substansi Pembangunan Kawasan Perdesaan	S1
11.	Yufriana Dethan, S.Sos NIP. 197507172012122003	Penata / III c	Sub Koordinator Substansi Peningkatan Motivasi Masy & Gotong Royong	S1
12.	Daud Nalle,A.Md.Gz NIP. 198510132010011019	Penata / III c	Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Alam	D3
13.	Matheos Bessie, SE NIP. 198302172007011005	Penata / III c	Sub Koordinator Substansi UED & Permodalan Desa	S1
14.	Kristian Toulasik NIP. 196701151986091001	Penata Muda Tk. I / III b	Pengelola sarana dan prasarana sumber daya alam	SLTA
15.	Marthinus Allo,SH NIP: 196912092007011025	Penata Muda Tk.I / IIIb	Pengelola data pemberdayaan ekonomi keluarga	S1
16.	Oskar Bolla, SE NIP. 197310052010011005	Penata Muda Tk.I / IIIb	Penyusun Bahan Pembinaan institusi Masyarakat perdesaan	S1

17.	Elisa Soeki, SH NIP.19731230200604017	Penata Muda Tk.I / IIIb	Analisis Pembangunan	S1
18.	Marid F. Mbeo, SH NIP: 197803212007011007	Penata Muda / IIIa	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	S1
19.	Fiktoria M. Kanuk, SH NIP. 197802012012122002	PenataMuda/IIIa	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	S1
20.	Justen J. Elia A,Md NIP. 19731020 201406 1 002	Penata Muda/III a	Pengelola Data	D3
21.	Wilem W. Sui NIP: 197306042006041002	Penata Muda/III a	Analisis Pengembangan Ekonomi Perdesaan	SLTA
22.	Adi A. Ndaomanu NIP: 197904012005011017	Penata Muda/III a	Pengelola data keuangan dan Pendapatan Desa	SLTA
23.	Sigrit Ernestus Hadi, SE NIP: 19960214 202201 1 007	Penata Muda/III a	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	SI
24.	Ronald Willry Mooy, SE NIP: 19960529 202203 1 002	Penata Muda/III a	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	SI
25.	Danial Zacharias NIP. 198110212012121006	Pengatur Muda Tk.I / II c	Bendahara pengeluaran	SLTA
26.	Semuel Tonak NIP. 198306102012121003	Pengatur Muda Tk.I/II c	Pengelola data Keuangan dan Pendapatan desa	SLTA

\sumber data DPMD Kab. Rote Ndao Tahun 2024

2. Sarana Gedung

DMPD Kab. Rote Ndao sampai dengan saat ini menempati sebuah gedung seluas 2.400 m² termasuk aula yang terletak di Kompleks perkantoran Bumi Ti'i Langa Permai

3. Sarana Perlengkapan Kantor

Sampai dengan Desember 2023 Jumlah Aset yang dimiliki DPMD adalah

Tabel 2.2.4**Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024**

No	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang{B/KB/RB}	Jumlah Barang	Harga
1	Station Wagon	2017	Rusak Berat	1	432,899,700.00
2	Sepeda Motor	2006	Baik	1	8,500,000.00
3	Sepeda Motor	2007	Rusak Berat	1	22,300,000.00
4	Sepeda Motor	2009	Rusak Berat	1	20,570,000.00
5	Sepeda Motor	2009	Rusak Berat	1	20,570,000.00
6	Sepeda Motor	2010	Baik	1	19,140,000.00
7	Sepeda Motor	2011	Baik	1	24,011,500.00
8	Sepeda Motor	2011	Baik	1	24,011,500.00
9	Sepeda Motor	2014	Baik	1	21,200,000.00
10	Mesin Gerinda	2017	Baik	1	1,250,000.00
11	Mesin Las Listrik	2016	Baik	2	3,500,000.00
12	Mesin Las Listrik	2022	Baik	1	1,282,000.00
13	Mesin Bor Tangan	2016	Baik	1	545,000.00
14	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	2022	Baik	1	801,000.00
15	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	2017	Baik	1	700,000.00
16	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2021	Baik	5	1,980,000.00
17	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2021	Baik	5	2,645,000.00
18	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2021	Baik	5	770,500.00
19	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2021	Baik	5	9,350,000.00
20	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2021	Baik	5	580,000.00
21	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2021	Baik	5	764,500.00
22	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2021	Baik	8	630,000.00
23	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2022	Baik	2	800,000.00
24	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2022	Baik	1	2,000,000.00
25	perkakas bengkel service lainnya (dst)	2022	Baik	1	2,910,000.00
26	Kunci Pipa	2017	Baik	2	1,000,000.00
27	Global Positioning System	2012	Baik	2	9,999,000.00
28	Ani-Ani	2017	Baik	1	2,500,000.00
29	alat pasca panen lainnya (dst)	2017	Baik	1	750,000.00

30	Alat Pengolahan lainnya	2017	Baik	1	2,500,000.00
31	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2012	Baik	1	2,500,000.00
32	Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	2016	Baik	2	600,000.00
33	Lemari Kayu	2009	Baik	1	1,800,000.00
34	Lemari Kayu	2010	Baik	1	1,996,000.00
35	Lemari Kayu	2010	Baik	1	8,000,000.00
36	Lemari Kayu	2011	Baik	1	28,322,000.00
37	Lemari Kayu	2013	Baik	4	9,200,000.00
38	Rak Kayu	2006	Baik	1	1,249,000.00
39	Rak Kayu	2009	Baik	1	4,500,000.00
40	Filing Cabinet Besi	2008	Baik	1	6,000,000.00
41	Brandkas	2008	Baik	1	3,360,000.00
42	Kontainer	2017	Baik	1	2,250,000.00
43	Lemari Kaca	2011	Baik	1	1,250,000.00
44	Overhead Projector	2004	Rusak Berat	1	1,848,000.00
45	LCD Projector/Infocus	2022	Baik	1	9,826,830.00
46	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2022	Baik	1	5,360,190.00
47	Alat Sidik Jari	2012	Rusak Berat	1	6,500,000.00
48	Papan Nama Instansi	2012	Baik	2	2,500,000.00
49	Alat Kantor Lainnya	2007	Baik	1	250,000.00
50	Alat Kantor Lainnya	2009	Baik	1	12,300,000.00
51	Alat Kantor Lainnya	2016	Baik	1	900,000.00
52	Meja Kerja Besi/Metal	2017	Baik	56	25,200,000.00
53	Meja Kerja Kayu	2008	Baik	1	2,550,000.00
54	Meja Kerja Kayu	2013	Baik	6	3,750,000.00
55	Meja Kerja Kayu	2016	Baik	11	4,932,400.00
56	Meja Kerja Kayu	2016	Baik	11	17,198,500.00
57	Meja Rapat	2009	Baik	1	4,800,000.00
58	Meja Rapat	2010	Baik	1	9,570,000.00
59	Tempat Tidur Kayu	2016	Baik	2	3,750,000.00
60	Meja 1/2 Biro	2010	Baik	1	2,570,000.00
61	Kursi Fiber Glas/Plastik	2006	Kurang Baik	1	1,415,000.00
61	Kursi Fiber Glas/Plastik	2009	Baik	1	1,700,000.00
62	Kursi Fiber Glas/Plastik	2019	Baik	200	16,900,000.00
63	Kursi Fiber Glas/Plastik	2020	Baik	10	1,160,000.00
64	Kursi Tamu	2017	Baik	1	7,500,000.00
65	Kursi Tamu	2019	Baik	1	5,625,000.00
66	Bangku Tunggu	2010	Baik	1	2,630,000.00

67	Sofa	2006	Baik	1	2,149,000.00
68	Sofa	2020	Baik	1	2,000,000.00
79	Meubeleur lainnya	2014	Baik	5	4,675,000.00
70	Meubeleur lainnya	2020	Baik	3	4,332,000.00
71	Meubeleur lainnya	2020	Baik	4	10,320,000.00
72	A.C. Window	2009	Baik	1	4,715,000.00
73	A.C. Window	2010	Baik	1	4,700,000.00
74	A.C. Window	2014	Baik	4	14,960,000.00
75	A.C. Window	2016	Baik	1	3,700,000.00
76	A.C. Window	2017	Baik	1	4,000,000.00
77	A.C. Split	2021	Baik	2	8,547,000.00
78	Kipas Angin	2016	Baik	3	2,100,000.00
79	Kipas Angin	2017	Baik	6	4,500,000.00
80	Televisi	2016	Baik	1	3,000,000.00
81	Televisi	2021	Baik	1	5,104,000.00
82	Loudspeaker	2019	Baik	4	47,946,800.00
83	Sound System	2010	Kurang Baik	1	24,860,000.00
84	Wireless	2006	Kurang Baik	1	2,948,000.00
85	Microphone Table Stand	2019	Baik	4	1,775,400.00
86	Unit Power Supply	2015	Baik	1	990,000.00
87	Camera Video	2016	Baik	1	6,000,000.00
88	Camera Video	2017	Baik	1	15,000,000.00
89	Camera Video	2019	Baik	2	14,734,000.00
90	Camera Video	2020	Baik	1	7,110,000.00
91	Mesin Jahit	2016	Baik	8	20,000,000.00
92	Tiang Bendera	2019	Baik	3	2,430,375.00
93	Lambang Instansi	2019	Baik	3	7,500,000.00
94	Mesin Obras	2021	Baik	5	13,585,000.00
95	Gordyin/Kray	2008	Baik	1	1,750,000.00
96	Gordyin/Kray	2010	Baik	1	10,000,000.00
97	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2007	Rusak Berat	1	9,152,000.00
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2014	Baik	1	2,310,000.00
99	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2006	Baik	1	2,239,000.00
100	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2019	Baik	4	10,608,000.00
101	Buffet Kaca	2016	Baik	1	2,300,000.00
102	Microphone/Wireless MIC	2017	Baik	2	2,000,000.00
103	Microphone/Wireless MIC	2019	Baik	4	11,118,800.00
104	Microphone/Boom Stand	2019	Baik	2	999,900.00
105	Audio Command Desk	2019	Baik	1	2,999,700.00

106	peralatan studio audio lainnya (dst)	2019	Baik	4	1,999,800.00
107	Slide Projector	2012	Kurang Baik	2	20,000,000.00
108	Camera Film	2014	Baik	3	5,445,000.00
109	Layar Film/Projector	2016	Baik	1	11,725,000.00
110	Layar Film/Projector	2017	Baik	1	11,600,000.00
111	Layar Film/Projector	2018	Baik	1	9,770,000.00
112	Layar Film/Projector	2018	Baik	1	12,300,000.00
113	Layar Film/Projector	2019	Baik	1	10,068,000.00
114	Layar Film/Projector	2019	Baik	1	10,068,000.00
115	Facsimile	2016	Baik	1	1,750,000.00
116	Wireless Amplifier	2017	Baik	1	5,000,000.00
117	Antene SHF Portable	2016	Baik	1	1,750,000.00
118	Bak Fiberglass	2015	Baik	2	7,350,000.00
119	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	2012	Kurang Baik	1	900,000.00
120	P.C Unit	2013	Kurang Baik	1	11,750,000.00
121	P.C Unit	2015	Baik	5	74,250,000.00
122	P.C Unit	2016	Baik	2	23,500,000.00
123	Lap Top	2015	Baik	4	49,500,000.00
124	Lap Top	2016	Baik	2	24,850,000.00
125	Lap Top	2017	Baik	1	13,900,000.00
126	Lap Top	2019	Baik	4	41,646,000.00
127	Lap Top	2019	Baik	1	11,632,500.00
128	Lap Top	2019	Baik	1	10,412,500.00
129	Lap Top	2020	Baik	1	9,439,000.00
130	Lap Top	2021	Baik	1	11,236,500.00
131	Hard Disk	2012	Kurang Baik	2	1,871,000.00
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	Baik	4	13,860,000.00
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	Baik	1	4,000,000.00
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	3	6,900,000.00
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	1	1,000,000.00
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Baik	1	1,000,000.00
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	Baik	5	17,500,000.00
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	Baik	3	10,500,000.00
139	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Baik	3	7,128,000.00
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Baik	4	9,519,500.00
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	2	4,748,000.00

142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	Baik	10	28,257,000.00
143	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	Baik	4	11,068,920.00
144	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik	1	32,846,000.00
145	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik	1	3,740,000.00
146	Peralatan Komputer lainnya	2009	Kurang Baik	1	1,500,000.00
147	alat pelindung lainnya lainnya (dst)	2021	Baik	10	820,050.00
148	alat pelindung lainnya lainnya (dst)	2022	Baik	1	1,000,000.00
149	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2007	Baik	1	332,100,000.00
150	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	Baik	1	348,300,000.00
151	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2008	Baik	1	318,758,342.00
152	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2020	Baik	1	70,000,000.00
153	Tugu Pembangunan	2020	Baik	2	40,000,000.00
154	Tugu Pembangunan	2020	Baik	3	60,000,000.00
155	Bangunan Penampung Air Baku	2020	Baik	1	45,000,000.00
156	Ilmu Pengetahuan Umum	2016	Baik	12	600,000.00
157	Buku Umum Lain-lain	2015	Baik	6	600,000.00
158	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2016	Baik	6	2,400,000.00
159	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2016	Baik	26	3,900,000.00
				Jumlah	RP. 2.932.140.707

Pada tabel 2.2.5 di gambarkan tentang sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menunjang kelancaran operasional pelayanan pada DMPD Kabupaten Rote Ndao, terdiri dari :

Tabel 2.2.5

Sarana dan Prasarana Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Nama	Totalan	Keadaan
1	Gedung Kantor	2 Unit	Baik
2	Gedung Aula	1 Unit	Baik

3	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik
4	Kendaraan Roda 2	9 Unit	Baik

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Rote Ndao selama dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut:

TABEL 2.6.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA TAHUN 2021-2023

[illegible]

TABEL 2.7

TARGET DAN REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO
PERIODE 2021-2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja												
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	2,647,663,700	100	2,623,552,908	100	2,149,877,650	100	2,546,482,656	100	2,534,409,781	100	2,102,107,949
		TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	100		100		100		100		100		100	
	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19	45,750,000	19	78,457,700	19	91,009,500		45,748,800		78,452,400		91,009,500
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra, Renja Induk PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA Induk SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD, Perubahan DPA SKPD	12	41,750,000	78	70,457,700		87,990,500	60	41,750,000	100	70,452,400		87,990,500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	7	4,000,000	11	8,000,000		3,019,000	11	3,998,800	11	8,000,000		3,019,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen , LKIP, LKPJ, LPPD, dan Evaluasi Renja pertriwulan					11						11	
	Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	2,260,230,000		2,236,148,008		1,827,090,000	2	2,169,441,556		2,152,577,431		1,786,836,309
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	2,212,830,000	2	2,188,808,008		1,780,890,000		2,122,041,556	2	2,105,240,431		1,740,636,309
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD dan barang jasa	12	47,400,000		47,340,000	2	46,200,000		47,400,000		47,337,000	2	46,200,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah	12	11,250,000	6	8,100,000		6,600,000	6	11,250,000	6	8,100,000		6,600,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Barang Milik Daerah SKPD	12	11,250,000		8,100,000	6	6,600,000		11,250,000		8,100,000	6	6,600,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Tenaga Kontrak daerah	12	105,000,000	332	105,000,000	332	-	332	95,000,000	332	105,000,000	332	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak daerah	12	105,000,000	34	105,000,000		0	33	95,000,000	34	105,000,000		0
	Administrasi Umum	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	127,916,000	100	103,208,500	100	137,681,500	100	127,847,000	100	100,095,100	100	132,156,340
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12	7,499,000	2	4,216,000		0	2	7,499,000	2	4,216,000		0
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12	8,548,000		22,474,000	1	57,450,000		8,547,000		22,474,000	1	51,985,740
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 buku	20,730,000	6	27,625,500	0	27,625,500	12	20,730,000	6	27,625,100	0	27,625,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja												
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			8		9		10		13		14		15	
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2,875,000	6	0	0	-	6	2,875,000	6	0	0	0
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	28,446,000		0	0	22,474,000		28,446,000		0	0	22,473,600
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Luar Propinsi	10	59,818,000	100	48,893,000	100	30,132,000	100	59,750,000	100	45,780,000	100	30,072,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		49,769,700	28	55,599,700	0	55,589,650	27	49,694,800	28	55,495,150		55,248,300
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Pengadaan Materai	12	4,175,000		4,173,000	0	4,164,000		4,175,000		4,173,000	0	4,164,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	12	45,594,700	12	51,426,700		51,425,650	12	45,519,800	12	51,322,150		51,084,300
	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Tersedianya Jasa Adm Keuangan		0		0	2			0			2	
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	47,748,000	250	37,039,000		31,907,000	250	47,500,500	250	34,689,700		30,257,500
	pengadaan sarana dan prasarana kantor	teredianya peralatan dan perlengkapan kantor		0		0		0						
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 unit roda 4,6 unit roda 2)	7	35,292,000		34,087,000		29,090,000	1	35,044,500		31,737,700		27,440,500
		Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		0		0	1	0					1	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa Perbaikan peralatan Kerja	4	3,996,000	35	2,952,000		2,817,000	6	3,996,000	35	2,952,000		2,817,000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor secara Berkala/Rutin	4	4,960,000		0	26	0		4,960,000			26	0
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	4	3,500,000	100	0	100	0	100	3,500,000	100	0	100	0
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12			0	12		12	0		0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						1					0	1	
	PROGRAM PENATAAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	100%	100,000,000	12	2,003,244,500		69,456,600	12	99,990,000	12	1,987,055,140		65,919,000
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya penataan kelembagaan dan institusi desa	25 desa	100,000,000		2,003,244,500	1	69,456,600		99,990,000		1,987,055,140	1	65,919,000
	Fasilitasi Penataan Kewenangan desa	Terlaksananya Penataan Kewenangan desa	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
		Terlaksananya Pemekaran desa	25	0	16	0		0	15	0	16	0		0
	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya Pembangunan/pengembangan sarana Transportasi Pedesaan (paket)	25	0	12			0			12	0		0
							16					0	16	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja												
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			8		9		10		13		14		15	
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	MENINGKATNYA KELOMPOK BINAAN USAHA MASYARAKAT PERDESAAN	100%	1,066,316,200	27	404,316,200		224,516,000	27	1,031,134,900	25	402,475,500		223,203,500
		CAKUPAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN					30	224,516,000					30	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa		1,066,316,200										
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya pendampingan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes dan RKPDes)	112	185,000,000	5	69,336,300	4	29,442,000	6.03	183,749,100	3.06	69,336,000	4.00	29,442,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Fasilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD)	112	141,417,000	100	150,000,000	100	138,869,000	100	141,061,500	100	148,768,000	100	137,556,500
	Pembinaan Peningkatan kapasitas aparatur PEMDES	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	112	282,919,300	100	0	100	0	100	282,719,300	100	0	100	0
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Des dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa	10 bumdes	50,000,000	2	50,000,000		56,205,000	2	49,752,000	2	50,000,000		56,205,000
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	25	237,000,000		0	2			219,000,000		0	2	0
	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Penataan aset desa	45	39,999,900	2	39,999,700		0	2	39,790,000	2	39,999,000		0
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksannanya Evaluasi Pembangunan Desa	112	129,980,000		94,980,200	2	0		115,063,000		94,372,500	2	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	MENINGKATNYA PEMBINAAN PEMERINTAH DESA	100%	803,639,900	46	663,717,900		313,140,400	46	800,903,350	46	645,103,900		304,132,400
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan					46						46	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten		100%		46			0	46	800,903,350	46			0
	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat adat	100%	96,589,900		40,450,000	46	6,395,000		96,252,400		40,320,000		6,395,000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lemabaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Lomba Desa dan Pokjanal Posyandu	4 psyd	236,130,000	46	99,402,900		197,792,000	46	235,498,600	46	98,117,900		197,519,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja												
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			8		9		10		13		14		15	
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Desa penerima desa	20	110,000,000		100,000,000	46	0		109,930,000		99,990,000	46	0
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksannya pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan (Pemberian Bantuan Mesin Las)	4	60,000,000	46	270,000,000		8,953,400	46	59,965,050	46	269,993,000		7,943,400
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya fasilitasi penguatan kelembagaan PKK	12	300,920,000		153,865,000	46	100,000,000		299,257,300		136,683,000	46	92,275,000
		Terlaksananya Pembinaan dan Supervisi TP-PKK	10		2			0	2	0	2	0		0
		Terlaksananya Jambore TP-PKK	1				2	0		0		0	2	0
		Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Stunting	4		4			0	4	0	4	0		0
		Terlaksananya monitoring Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) 10 PAUD	4				4	0				0	4	0
		Terlaksananya Pelatihan Kelompok Dasawisma (1 model)												
		Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK	1	-	2			0	2	0	2	0		0
		Terlaksananya HUT PKK	10				2	0		0		0	2	0
		Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Fokus terhadap Desa Lokus Stunting, Kampung KB	22 000		2			0	2	0	2	0		0
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PKK	2 dok	-			2	0		0		0	2	0
		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pemberian Makanan tambahan untuk sasaran stunting di desa (119 desa/kelurahan)	1 dok		2			0	2	0	2	0		0
		Terbentuknya Kearifan Lokal dan Norma Adat terkait Stunting (50 desa lokus stunting)	2				2	0		0		0	2	0
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan (Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi Desa)	1					0	1	0		0		0
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Desa Penerima Hibah			46			0		0	46	0		0
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						46	0				0	46	0
		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan (Pelatihan Mengelas)	6		5		4	0	6.03	0	3.06	0	4	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja												
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			8		9		10		13		14		15	
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan (Pemberian Bantuan Mesin Las)	3500		3500		0		3500	0	5417	0		0
		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian dan Peternakan (Pelatihan Pembuatan Abon ikan dan daging sapi, Bolu Singkong, Kue Puding Salju Ubi Jalar, Cake Ubi Jalar dan Kue Kuk)	300		300		0		300	0	164	0		0
		Terlaksananya Pelatihan las					3700	0		0		0	4487	0
		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Pedesaan	90		65		0		115	0	110	0		0
		Gelar TTG	1024	-	1024		0		2400	0	1024	0		0
				4,617,619,800		5,694,831,508		2,756,990,650		4,478,510,906		5,569,044,321		2,695,362,849
Rata-rata capaian kinerja (%)														
Predikat Kinerja														
Faktor pendorong pencapaian kinerja:														
Faktor penghambat :														
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :														
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :														

Berdasarkan hasil tabel 2.7 dapat dijelaskan realisasi anggaran DPMD selama tahun 2021-2023 dan capain kinerja sub kegiatan dengan realisasi 97%. untuk itu perlu di pertahankan dan ditingkatkan capaian kinerja dan anggaran yang sudah optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN

ROTE NDAO

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa mandiri yang dapat dioperasionalkan, maka DPMD merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Penyusunan Laporan Dokumen Keuangan dan aset Desa yang masih belum optimal	Kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas
			Kondisi SDM Pemerintah desa yang belum memadai serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih relatif rendah
			Kurangnya Koordinasi dari desa ke tingkat kabupaten
			Terjadi perubahan aturan dan regulasi yang selalu berubah ubah
		Peran dan Fungsi Pemerintah desa dan Masyarakat desa yang belum optimal	Terjadi perubahan aturan dan regulasi yang selalu berubah ubah
			Pembangunan usaha ekonomi keluarga, dan kelompok masyarakat dan skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDES yang rendah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Pemberdayaan Desa karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas, maka isu strategis DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keberdayaan lembaga perdesaan
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa.
3. Peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa.
4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat Desa
5. Peningkatan pendapatan asli desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

4.1. Tujuan dan Sasaran DPMD Kabupaten Rote Ndao

4.1.1 Tujuan

Tujuan DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator DPMD Kabupaten Rote Ndao

NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENSTRA		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	SPM/IKK/ILAINNYA	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN					REALISASI	TARGET	2025	2026	2026
									2023	2024			
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik												
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa			Indeks Desa Membangun				0.6437	0.6528	0.6636	0.6727	0.6727
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa		Persentase Desa Maju dan Berkembang	%	Jumlah Desa Maju +Desa Berkebang /Jumlah Total Desa x 100		73.21	74.50	77.86	84.21	84.21
				Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pemberdayaaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	%	Jumlah PKK Akif / Jumlah PKK x 100		100	100	100	100	100
					Persentase Posyandu Aktif	%	Jumlah Posyandu Aktif / Jumlah Posyandu x 100		100	100	100	100	100
					Persentase Desa Siaga Aktif	%	Jumlah Desa Siaga Aktif /Jumlah Desa siaga yang di bentuk x 100		100	100	100	100	100
					Realisasi APBDes	%	Realisasi APBDes / TotalAPBDes x 100		100	100	100	100	100
					Persentase Bumdes Berkembang	%	Jumlah Bumdes Berkembang / Total Bumdes x 100		20.95	28.57	33.33	38.10	38.10

1.1. Cascading Kinerja DPMD Tahun 2025-2026

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sedangkan cascading kinerja DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indicator dan target seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2026

TUJUAN	SASARAN		PPROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA AWAL TAHUN	TARGET KINERJA		
							TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR
1	2		3	4		5	6	7	8
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik				Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Poin	20	21	22.00	22
				Indeks Inovasi Daerah	Poin	40	41	42.00	42
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	%	100	100	100	100
				Presentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
				Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100
			1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	16	16	16	32
			1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	12	12	12	24
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	8
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Org/Bin	32	32	32	64
			3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bin	32	32	32	64
			4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12	12	24
			3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	12	12	12	100
			5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	12	12	12	24
			4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	12	12	24
			7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	1	2
			8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	12	24
			9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1	1	4
			10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	40	40	80
			5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100
			11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	12	24
			6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100
			12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7	7	7	14
			13	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					0
			14	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Unit				0
			Presentase Realisasi APBDes				100	100	100
			II	Prpogram Penataan Desa	Meningkatnya Penataan Desa				
				7	Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	100	100
				Persentase Penataan Kelembagaan Dan Institusi Desa					
			15	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Desa	22	22	22	44
			III	Program Administrasi Pemerintah Desa	Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa				
				8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa	%	100	100	100
						%	100	100	100
			16	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	112	112	112	224
			17	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	112	112	112	112
			18	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	Dokumen	14	14	14	28

TUJUAN	SASARAN		PPROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA AWAL TAHUN	TARGET KINERJA		
							TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR
1	2		3	4		5	6	7	8
		19	Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Penataan Aset Desa	Dokumen	112	112	112	224
		20	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Pembangunan Desa	Dokumen	112	112	112	224
			Pemberdayaan dan Desa	Pemberdayaan dan Desa					
		IV	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat oleh PKK	%	100	100	100	100
				Persentase Kapasitas KPM	%	100	100	100	100
				Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam Berinovasi	Kelompok	5	5	5	10
		1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		%	100	100	100	200
		21	Fasilitas Penataan, Pdemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM,dan Karang taruna) Lembaga Adat desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat	Jumlah Kelembagaan masyarakat desa dan Masyarakat adat	Dokumen	134	134	134	268
		22	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,Posyandu, LPM, dan karang taruna) lembaga adat desa/ kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lomba Desa dan Pokjanal Posyandu	posyandu	4	4	4	8
		23	Fasilitas Pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pelatihan Keterampilan usaha Industri kerajinan	laporan	5	5	5	10
		24	Fasilitas TIM Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitas Penguatan Kelembagaan PKK	Dokumen	12	12	12	24
					%	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Rote Ndao, strategi dan kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal.

Adapun strategi DPMD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana termuat dalam **tabel 5.1** :

Tabel 5.1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Pemberdayaan Desa,
			Melakukan kerjasama dengan aparat desa dalam penyusunan dokumen
		Meningkatkan kualitas Kelembagaan Desa	Membangun kerja sama antar desa dalam Pemberdayaan Ekonomi, pengembangan Potensi , dalam menyediakan data dan informasi pembangunan yang berkualitas
			Meningkatkan monitoring dan evaluasi pemberdayaan Desa
		Meningkatkan kualitas dalam penyusunan dokumen	Melaksanakan penyusunan dokumen dalam pengelolaan keuangan desa dan aset desa
			Penyusunan perencanaan sesuai regulasi yang resmi
		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan desa	Peningkatan koordinasi dan sinergitas terhadap perangkat desa
			Sinkronisasi perencanaan Desa dan Kabupaten

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan DPMD dalam Pemberdayaan Desa pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan PMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2026

Tujuan	Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kond. KnpPd Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		7	8	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Terwujudnya Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100	2,178,195,526	100	2,199,977,481	100	2,221,977,256	100	4,421,954,737	Sekretariat	
		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah			100		100		100						
		Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu													
		Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			100		100		100						
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu								32	123,200,000		Kab. RN
		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12	50,000,000	12	53,000,000	12	55,700,000	24	108,700,000		Kab. RN
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	3,019,000	4	7,000,000	4	7,500,000	8	14,500,000		Kab. RN
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu								100	3,811,281,151		Kab. RN
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32	1,860,400,576	32	1,860,400,576	32	1,860,400,575	29	3,720,801,151		Kab. RN
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		12	45,240,000	12	45,240,000	12	45,240,000	24	90,480,000		Kab. RN
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu								100	14,400,000		Kab. RN
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12	7,200,000	12	7,200,000	12	7,200,000	24	14,400,000		Kab. RN
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah								100	-		Kab. RN
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	4,426,500	12	5,500,000	12	6,999,775	24	12,499,775		Kab. RN
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		1	40,500,000	1	42,000,000	1	44,750,000	2	86,750,000		Kab. RN
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	20,068,150	12	20,500,000	12	20,500,000	24	41,000,000		Kab. RN
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	26,499,300	1	23,510,600	1	26,300,000	2	49,810,600		Kab. RN
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10	39,417,000	10	52,426,305	10	60,750,000	20	113,176,305		
		5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100	75,436,906		Kab. RN
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	36,800,000	12	37,000,000	12	38,436,906	24	75,436,906		Kab. RN
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan matrei		12	1,625,000	12	3,000,000	12	5,000,000	24			
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara								100	86,400,000		Kab. RN
		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7	43,000,000	7	43,200,000	7	43,200,000	14	86,400,000		Kab. RN
		II	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa		100	69,000,000	100	69,690,000	100	70,386,900	100	#REF!		
			Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Kelembagaan Dan Institusi Desa											
		7	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang melakukan pembentukan penghapusan (Kepmen 900)		22	69,000,000	22	69,690,000	22	70,386,900	22			
		III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pengelolaan keuangan dan aset daerah		100	130,000,000	100	131,300,000	100	132,613,000	100	263,913,000	Bidang PEMDES	
				Presentase pemberdayaan bumdes		100		100		100		100			
		10	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (RKPdes dan RPJMDes)		112	25,000,000	4	20,000,000	4	25,522,600	4	167,390,400		
		22	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Juml hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Dokumen Desa		112	25,000,000	40	15,300,000	40	25,522,600	40	40,822,600		Kab. RN,
		23	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja	Terlaksananya Fasilitas badan Usaha Milik Desa		4	30,000,000	4	20,000,000	4	30,522,600	8	50,522,600	Bidang UED	Kab. RN, Prov.NTT
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Bimtek Kepala Desa, BPD, Operator SIUSKEDES)					11,000,000	11					
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					40,000,000	48					
		24	Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		18	25,000,000	18	10,000,000	18	25,522,600	18	35,522,600		Kab. RN,
		25	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan		4	25,000,000	4	15,000,000	4	25,522,600	8	40,522,600	bidang PSD	Kab. RN, Prov.NTT

Tujuan	Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kond. KnpPd Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		7	8	7	8	9	10	11	12	13	14
		IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		100	273,000,000	100	275,727,500	100	278,487,300	200	554,214,800	bidang PSD	
			Persentase PKK aktif		100		100		100		100				
			Persentase Posyandu Aktif		100		100		100		100				
			Persentase Pengetahuan dan ketrampilan dalam berinovasi		100		100		100		100				
			persentase kelompok mayarakat dalam berinovasi		100		100		100		100				
			Fasilitas Penataan, Pdemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,LPM,dan Karang taruna) Lembaga Adat desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna) Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan MasyarakatHukum Adat		134	23,500,000	134	35,000,000	134	35,000,000		70,000,000	Bidang ttg	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,Posyandu, LPM, dan karang taruna) lembaga adat desa/ kelurahan dan Masvarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya		4	142,000,000	4	80,045,000	4	80,500,000		160,545,000		
			Fasilitas Pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Berinovasi		5	7,500,000	5	10,000,000	5	11,615,475		21,615,475		
			Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong	JumlahLaporan Hasil Bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat					50,000,000		50,000,000				
		13	Fasilitas TIM Penggerak PKK dalamPenyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Fasilitas Penguatan Kelembagaan PKK		12	100,000,000	12	100,682,500	12	101,371,825	24	202,054,325		
						100	2,650,195,526	100	2,676,694,981	100	2,703,464,456	100	5,503,995,537		

**7.1. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah DPMD
Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah DPMD
Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana
tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
				REALISASI	TARGET			
				2023	2024	2025	2026	2026
1	Indeks Desa Membangun			0.6437	0.6528	0.6636	0.6727	0.6727
2	Persentase Desa Maju dan Berkembang	%	Jumlah Desa Maju +Desa Berkebang /Jumlah Total Desa x 100	73.21	74.50	77.86	84.21	84.21
3	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	%	Jumlah PKK Akif / Jumlah PKK x 100	100	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu Aktif	%	Jumlah Posyandu Aktif / Jumlah Posyandu x	100	100	100	100	100
5	Persentase Desa Siaga Aktif	%	Jumlah Desa Siaga Aktif /Jumlah Desa	100	100	100	100	100
6	Realisasi APBDes	%	Realisasi APBDes / TotalAPBDes x 100	100	100	100	100	100
7	Persentase Bumdes Berkembang	%	Jumlah Bumdes Berkembang / Total Bumdes x 100	20.95	28.57	33.33	38.10	38.10

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJE LASAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR
				REALISASI	TARGET			RPD
				2023	2024	2025	2026	2026
Permendagri 86/2017								
ASPEK PELAYANAN UMUM								
	PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA							
1	Indeks Desa Membangun	%		0.6437	0.6528	0.6636	0.6727	0.6727
2	Persentase Desa Maju dan Berkembang	%	Jumlah Desa Maju +Desa Berkebang /Jumlah Total Desa x 100	73.21	74.50	77.86	84.21	84.21
3	Persentase Pemberdayaiaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	%	Jumlah PKK Akif / Jumlah PKK x 100	100	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu Aktif	%	Jumlah Posyandu Aktif / Jumlah Posyandu x 100	100	100	100	100	100
5	Persentase Desa Siaga Aktif	%	Jumlah Desa Siaga Aktif /Jumlah Desa siaga yang di bentuk x 100	100	100	100	100	100
6	Realisasi APBDes	%	Realisasi APBDes / Total APBDes x 100	100	100	100	100	100
7	Persentase Bumdes Berkembang	%	Jumlah Bumdes Berkembang / Total Bumdes x 100	20.95	28.57	33.33	38.10	38.10

BAB VIII

PENUTUP

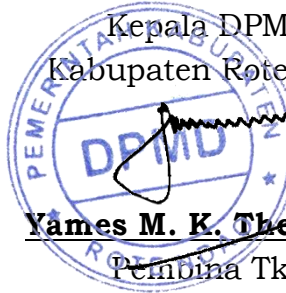
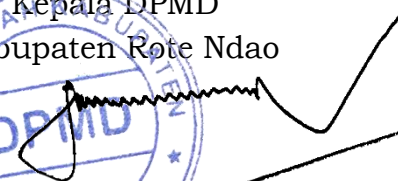
A. Kesimpulan

1. Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi DPMD.
2. Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yang akan ditetapkan, agar setiap bidang di lingkungan DPMD melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan fungsinya.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024-2025 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mendukung upaya pemberdayaan masyarakat desa dan mempercepat penurunan jumlah penduduk perdesasan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Ba'a 30 Januari 2024

Kepala DPMD
Kabupaten Rote Ndao



James M. K. Therik, SH
Pembina Tk.I
NIP. 198004291999031001